

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN
PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PADA
KOTA TERMISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-
2018**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

SRI WAHYUNI

1505026169

PRODI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 1505026169
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kota Termiskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

29 Juni 2022

Dan dapat diterimasebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Ekonomi Islam pada tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 29 Juni 2022

Ketua Sidang

Kartika Marella Yanni, S.S.T., M.E
NIP. 199304212019032008

Sekretaris Sidang

Zuhdan Adv Fataron, S.T., M.M
NIP. 19840308201503 1003

Penguji I

Ana Zahrotun Nihayah, S.E., M.A.
NIP. 198910092019032015



Penguji II

Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 19900523 201503 1 004

Pembimbing I

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II

Zuhdan Adv Fataron, S.T., M.M
NIP. 19840308201503 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
An.Sdri. Sri Wahyuni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

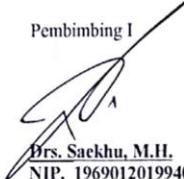
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 1505026169
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Studi Kasus 7 Kota Termiskin di Jawa Tengah).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

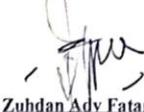
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing I


Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Pembimbing II


Zuhdan Adv Fataron, M.M.
NIP. 198403082015031003

MOTTO

.....وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.....

“..... Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.....”

(Q.S Al-Qashas : 77)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Skripsi ini untuk :

Kedua Orangtua Saya

Bapak Sunarto dan Ibu Triyani yang selalu mendoakan dengan tulus dan juga memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan moril maupun materil kepada penulis yang tiada henti-hentinya. Semoga penulis bisa menjadi insan yang berguna bagi sesama dan bisa membahagiakan serta membanggakan kalian.

Keluarga Besar di rumah

Terimakasih atas doa, semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis selama ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator,



Sri Wahyuni

NIM 1505026169

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	

ر	= r	ف	= f	
---	-----	---	-----	--

B. Vokal

- = a

- = i

- = u

C. Diftong

اِيّ = ay

اُوّ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *al-thibb* ^طابطلا

E. Kata Sandang (... لا)

Kata sandang(... لا) ditulis dengan *al*-.... misalnya *al-* ^{لا}عانصلا = *al-*

shina'ah. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya *al-ma'isyah* ^هيعييطلاةشيعلما = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, kemiskinan merupakan salah satu isu besar yang seolah-olah menjadi “pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan. Banyak usaha yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, diantaranya melalui program bantuan modal atau uang tunai kepada rakyat miskin sampai program transmigrasi. Berdasarkan teori-teori yang ada dan beberapa penelitian yang telah dilakukan, masalah kemiskinan umumnya berkaitan dengan beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia, pengangguran dll. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota termiskin di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan sampel dari 7 Kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics 23*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil perhitungan uji t $-0,530$ lebih kecil daripada t tabel sebesar $2,037$. Besar pengaruhnya sebesar $-0,208$ dengan nilai signifikansi $0,60$. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil hitung uji t dengan nilai t hitung sebesar $2,696$ lebih besar jika dibandingkan nilai t tabel sebesar $2,037$ dengan besaran pengaruh $0,004$ dan nilai signifikansi sebesar $0,01$.

Kata kunci : Kemiskinan, IPM, dan Pengangguran

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Nurudin, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Drs. Saekhu, M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Zuhdan Ady Fataron, M.M, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M, selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan dan memberikan semangat selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Kedua orang tua penulis Bapak Sunarto dan Ibu Triyani, adik saya Dwi Imam Safi'i, Mas Sukanto beserta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan demi kesuksesan studi ini.
8. Sahabat-sahabat saya Luluk Mardiyah S.E, Awalina Rosihan S.E dan Ismi Ailiyah S.E yang telah menemani, memotivasi dan mendoakan penulis.
9. Teman-teman senasib dan seperjuangan Keluarga Ekonomi Islam D-2015 yang telah menemani, saling memotivasi dan mendokan selama ini, semoga selalu diberi kemudahan.
10. Keluarga Besar Kader-kader Posyandu yang selalu mendoakan dan memberi semangat yang luar biasa kepada penulis.
11. Keluarga Kost Amalia khususnya Mba Iswa, Ana, Maya, dek Rifqa yang telah memberikan support kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin Yarabbal 'aalamin.*

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis,

Sri Wahyuni

NIM 1505026169

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	11
2.1.2 Pengangguran.....	14
2.1.3 Kemiskinan.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran	29

2.4 Hipotesis	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.1.1 Jenis Data.....	32
3.1.2 Sumber Data	32
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.2.1. Populasi	33
3.2.2 Sampel.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.1 Metode Dokumentasi	36
3.2.2 Studi Pustaka	36
3.4 Variabel Penelitian	36
3.5 Teknik Analisis Data	37
3.5.1 Statistik Deskriptif	37
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	40
3.5.4 Analisis Regresi	42
BAB IV	44
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	44
4.1.2 Profil Kabupaten	45
4.1.3 Kemiskinan.....	55
4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	57
4.1.5 Pengangguran.....	58

4.2 Hasil Penelitian	60
4.2.1 Statistik Deskriptif	60
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	60
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	64
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	67
BAB V.....	71
SIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah (2014-2018).....	4
Tabel 2. Presentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah (2014-2018).....	6
Tabel 3. Presentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah (2014-2018).....	7
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 5. Populasi Penelitian.....	33
Tabel 6. Sampel Penelitian.....	35
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	65
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	66
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 2. Peta Kabupaten Wonosobo.....	45
Gambar 3. Peta Kabupaten Kebumen.....	47
Gambar 4. Peta Kabupaten Brebes.....	48
Gambar 5. Peta Kabupaten Rembang.....	50
Gambar 6. Peta Kabupaten Purbalingga.....	51
Gambar 7. Peta Kabupaten Pemasang.....	52
Gambar 8. Peta Kabupaten Banjarnegara.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu isu besar yang seolah-olah menjadi “pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan. Banyak usaha yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, diantaranya melalui program bantuan modal atau uang tunai kepada rakyat miskin sampai program transmigrasi.

Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, serta akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah berfirman¹ :

وَأَلْيَسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar”.*²

Dalam Pandangan Islam, kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, kemiskinan merupakan satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan

¹ Ari Kristin Prasetyo Ningrum dan U. Sulia Sukmawati, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, Kudus : STAIN Kudus, 2018, h. 219

² <https://tafsirweb.com/1541-quran-surat-an-nisa-ayat-9.html>

potensi yang ada, kemiskinan harus diupayakan untuk dihindari, dan apabila kemiskinan tetap terjadi, harus dihadapi dengan sabar, tawakkal dan disertai dengan usaha untuk melepaskan diri darinya. Salah satu ulama yang memberikan pemikirannya mengenai konsep pengentasan kemiskinan adalah Yusuf Qardhawi. Enam sarana yang ditawarkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut :

Pertama : Bekerja

Yang dimaksud bekerja menurut Qardhawi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang atau memberikan jasa. Bekerja semacam inilah yang dimaksud Qardhawi sebagai senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Bekerja merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk memakmurkan bumi yang merupakan tugas manusia sebagai khalifah di bumi.

Kedua : Jaminan Sanak Famili

Menurut Qardhawi, untuk mengangkat harkat manusia, Islam memiliki syariat yang orisinal dan jelas yaitu bekerja. Akan tetapi, ada beberapa kenyataan manusia-manusia yang tidak mampu bekerja seperti orang yang lemah, anak-anak kecil, orang yang sudah tua renta, orang yang sakit atau cacat, atau mereka yang tertimpa bencana sehingga tidak mampu bekerja. Menghadapi kenyataan seperti ini, Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah diri dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Islam memuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Islam menjadikan seluruh kerabat saling menopang dan saling menunjang.

Ketiga : Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak yatim, para janda, ibu yang sudah tua renta, atau ayah yang sudah udzur, mereka yang buta dan mereka yang cacat sedangkan mereka tidak memiliki saudara. Menurut Qardhawi,

Islam tidak pernah melupakan mereka, secara tegas dan pasti Islam telah menentukan hak mereka dalam harta orang yang berada yaitu zakat. Jadi tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan. Menurut Qardhawi, Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan Islam. Dalam hubungan ini Islam menyerahkan wewenang kepada Negara untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak.

Keempat : Jaminan Baitul Mal

Qardhawi menjadikan baitul mal ini sebagai sarana keempat dalam mengentaskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun dalam baitul mal dapat dipergunakan.

Kelima : Kewajiban di luar zakat

Ada beberapa kewajiban selain zakat yang menurut Qardhawi merupakan sumber bantuan yang cukup signifikan bagi kaum fakir dan miskin dalam rangka menghapus kemiskinan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hak tetangga. Allah SWT memerintahkan melalui kitab-Nya untuk menjaga hak ini. Rasulullah SAW pun menyuruh kita untuk menghormatinya. Beliau menjadikan sikap menghormati tetangga sebagai bagian dari iman dan tindakan menyia-nyiakan mereka sebagai ciri orang yang terlepas dari ikatan Islam.
- b. Berkurban pada hari raya kurban. Menurut mazhab Hanafiyah, berkurban wajib hukumnya bagi mereka yang berkelapangan atau mampu. Hal ini berdasarkan hadist yang artinya “ barang siapa yang berkelapangan tetapi tidak berkurban maka janganlah ia dekat dengan mushalla kami”.
- c. Denda karena melanggar sumpah
- d. Tebusan *zihar*, yaitu barang siapa mengatakan kepada istrinya “ punggungmu seperti punggung ibuku atau saudaraku atau serupa dengan itu, haramlah baginya istrinya sampai ia membayar tebusan dengan memerdekakan budak. Bila tidak ada budak, ia harus berpuasa dua bulan

berturut-turut. Bila tidak mampu ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Keenam : Sedekah sukarela dan kemurahan hati individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Islam pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.³

Berdasarkan isi dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), bahwa pemerintah Indonesia menetapkan sembilan sektor kebijakan pembangunan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Target penanggulangan kemiskinan adalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), pembangunan manusia (*human development*) dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).⁴

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

³ Firman Setiawan dan Iswatul Hasanah, “*Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal DINAR Ekonomi Syariah, Madura : Universitas Trunojoyo, 2016, Vol. 1, No. 1, h.7

⁴ M. Alhudori, *Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*, Jurnal of Economics and Business, Vol.1 No.1, Jambi: Universitas Batanghari, 2017, h. 113

Tabel.1**Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah (2014-2018)**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2014	4 836,45	14,46
2015	4 577,04	13,58
2016	4 506,89	13,27
2017	4 450,72	13,01
2018	3 897,20	11,32

Sumber : <https://www.google.com>

Dilihat dari tabel.1 diatas, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 14,46 %, lalu mengalami penurunan sebesar 0,88 menjadi 13,58 % di tahun 2015. Di tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah juga mengalami penurunan sebesar 0,31 %. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 13,01 % mengalami penurunan sebesar 0,26 % dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2018, jumlah penduduk miskin mengalami penurun sebesar 1,69 % dari tahun sebelumnya. Ini merupakan progress yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu faktor yang menjadi pengaruh utama dalam masalah kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkolerasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya tingkat kemiskinan menjadi rendah. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan

rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup layak.⁵

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.⁶

Tabel 2

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah (%)
2014	68,78
2015	69,49
2016	69,98
2017	70,52
2018	71,12

Sumber : bps.go.id

⁵ *Ibid*, h.117

⁶ Yunie Rahayu, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi", *Jurnal of Economics and Business*, Jambi : STIE Muhammadiyah, 2018, Vol.2, No.1, h.167

Berdasarkan tabel diatas, angka Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2014-2018. Pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,71%. Lalu di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,49%. Di tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,54%. Dan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,6%. Walaupun mengalami kenaikan yang cukup baik, tetap saja tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi.

Selain Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Pengangguran dapat diartikan seseorang angkatan kerja yang sedang mencari kerja, tidak bekerja sama sekali, atau bekerja selama 35 jam per minggu karena tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya pada suatu tingkat upah tertentu secara aktif. Sukirno (2006), menyatakan bahwa pengangguran dapat membawa dampak buruk seperti mengurangi pendapatan masyarakat sendiri sehingga mempengaruhi kemakmuran yang mereka capai. Usaha untuk menyusutkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama-sama berharganya. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi maka pengangguran akan berkurang sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Kesempatan kerja semakin tinggi tingkat kemiskinan pun akan semakin rendah.⁷

Tabel. 3

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah (2014-2018)

Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
2014	6,02
2015	5,68
2016	4,99
2017	4,57

⁷ Rizky Agung Kurniawan, “*Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2007-2016*”, JUPE, Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2018, Vol. 6, No.2, h.104

2018	4,51
------	------

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2019

Dari tabel.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,34 % pada tahun 2015. Lalu di tahun 2016 tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu sebesar 0,69 %. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2017, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah turun sebesar 0,42 %. Dan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,06 %. Walaupun tingkat pengangguran sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun hal ini masih juga belum bisa mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan paparan permasalahan yang timbul diatas, maka peneliti tertarik untuk tertarik mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tentang kemiskinan dengan mengangkat judul skripsi “ **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Studi Kasus Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah)** ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
2. Bagaimana Pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Bagi masyarakat

Sebagai tambahan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi ilmiah mengenai indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran dan kemiskinan, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum Provinsi Jawa Tengah, profil kabupaten, deskripsi data serta hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang. Menurut Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan dasar standar hidup layak.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Menurut Napitupulu, indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang dan hidup sehat untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas.

Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bekerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah.⁸

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu :

- a. Indeks Harapan Hidup
- b. Indeks Pendidikan
- c. Indeks Standar Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X1+X2+X3)$$

Dimana :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100.⁹

2. Indeks Pembangunan Menurut Islam

Pembangunan adalah suatu kewajiban agama. Bukan hanya aspek-aspek tertentu agama Islam saja yang diajarkan, tetapi mereka juga terkait oleh keharusan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Lembaga-

⁸ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi*, 2013, Vol. 9, No. 1, 6

⁹ Rio Dwi Heriansyah et. al, "Analisis Pengaruh Jumlah Industri dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012-2016", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2018, Vol. 2, Jilid 3, 458

lembaga keagamaan mempunyai tugas yang penting untuk bekerja demi pembangunan manusia. Islam merupakan pemersatu kebanyakan masyarakat Indonesia, pengembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari program pendidikan Islam karena kegiatan pengembangan masyarakat adalah perwujudan dari konsep kewajiban manusia mengabdikan kepada Allah.

Pilar pembangunan manusia adalah istishlah atau kebaikan/kemaslahatan bagi manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan akan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh manusia harus memperhatikan pilar ini. Pelaksanaan pilar pembangunan ini hanya memberikan dua rambu yaitu halal dan haram yang masing-masing konsekuensi yaitu pahala atau dosa. Jika semua kebijakan terhadap pembangunan manusia membawa kebaikan bagi kualitas hidup manusia maka hal tersebut halal dilakukan dan mereka berhak mendapatkan pahala karena menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah SWT, sedangkan sebaliknya jika mereka membuat kebijakan yang dapat merusak kualitas hidup manusia maka hal tersebut haram dari sisi aturan dan dosa jika tetap dilakukan. Pada akhirnya, pembangunan kualitas manusia dengan menitikberatkan pada pembangunan keilmuan dan keimanan mampu menghasilkan generasi baru yang cerdas berilmu dan berkemajuan dan memiliki spirit keimanan dan tauhid kepada Allah SWT. Sehingga Islam hadir pada setiap pola pikir masyarakat pada setiap pengambilan keputusan serta pada segenap lini kehidupan di masyarakat. Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah terciptanya lingkungan serta kehidupan social masyarakat yang baik dan beradab.

Islam memandang bahwa bekerja merupakan kewajiban setiap insan. Karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Islam juga mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahuinya dengan ilmu atau dengan kata lain pekerjaan harus dikerjakan oleh orang

yang ahli dibidangnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : "...dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya". (QS : Al-Isra' :36)

Allah mengingatkan manusia agar mencegah keburukan dengan tidak berucap apa yang tidak diketahui, jangan mengaku tahu apa yang tidak engkau ketahui, termasuk dalam hal ini mengaku punya pengetahuan atau kompetensi di suatu bidang padahal dia tidak memilikinya. Ayat ini menuntun manusia jika bekerja menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat untuk meraih pengetahuan.¹⁰

2.1.2 Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Untuk mengukur pengangguran di dalam suatu Negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (*unemployment rate*), yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (*labor force*).

¹⁰ As'ad Bukhari, "Islam dan Pembangunan Manusia Di Era Globalisasi", Jurnal Studi Islam, 2018, Vol.5, No. 1

Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja., yang berada dalam kelompok umur tertentu (di Indonesia misalnya, yang termasuk dalam angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas, sedangkan di USA adalah mereka yang berumur antara 15-64 tahun.

Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output (*loss of output*) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (*human misery*), dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumberdaya ekonomi. Disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara maju dimana Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur.

2. Jenis-jenis Pengangguran

Dilihat dari sebab-sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut :

a. Pengangguran friksional atau transisi (*frictional or transitional unemployment*). Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahannya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan yang berbeda. Dengan perkataan lain, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi sebagai hasil dari pergerakan individual antara bekerja dan mencari pekerjaan baru.

b. Pengangguran structural (*structural unemployment*). Adapun yang dimaksud dengan pengangguran structural adalah jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan

permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan di dalam pasar tenaga kerja yang terjadi antara lain karena adanya peningkatan permintaan atas suatu jenis pekerjaan, sementara jenis pekerjaan lainnya permintaannya mengalami penurunan, dan penawaran itu sendiri tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap situasi tersebut.

Singkatnya, pengangguran structural adalah pengangguran yang terjadi ketika perekonomian beroperasi pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) atau tingkat alamiah (*natural rate*). Salah satu factor penyebab timbulnya pengangguran structural adalah karena adanya kemajuan teknologi (*technological progress*). Dengan kemajuan teknologi, di satu pihak memang memungkinkan perusahaan juga akan mengurangi tenaga kerja yang digunakan. Pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi inilah yang dinamakan pengangguran teknologi (*technological unemployment*).

c. Pengangguran alamiah (*natural unemployment*) atau lebih dikenal dengan istilah tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) adalah tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan (*expected inflation*) sama dengan tingkat inflasi actual (*actual inflation*). Milton Friedman (1998) mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat pengangguran dimana tekanan keatas (*upward pressure*) dan tekanan kebawah (*downward pressure*) terhadap inflasi harga dan upah berada dalam keseimbangan. Pada tingkat alamiah (*natural rate*), inflasinya adalah stabil, atinya tanpa kecenderungan untuk menampilkan percepatan (*acceleration*) ataupun penurunan inflasi.

Oleh karena itu, tingkat pengangguran alamiah juga sering didefinisikan sebagai tingkat pengangguran yang tidak memacu inflasi (*nonaccelerating inflation rate of unemployment*, disingkat NAIRU), dan oleh Blanchard didefinisikan sebagai tingkat pengangguran yang berkaitan dengan keseimbangan makroekonomi dimana tingkat inflasi yang diharapkan (*expected inflation*) adalah sama dengan tingkat inflasi actual

(*actual level*). Pengangguran alamiah terdiri atas pengangguran friksional dan pengangguran structural, dan para ahli memperkirakannya berkisar antara 4,0-6,5 persen.

d. Pengangguran siklus atau konjungtural (*cyclical unemployment*) adalah jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat (*aggregate effective demand*) di dalam perekonomian dibandingkan dengan penawaran agregat. Oleh karena itulah, para ahli ekonomi sering menyebut jenis pengangguran ini sebagai "*demand-deficient unemployment*". Sebaliknya, pengangguran siklis atau konjungtural akan berkurang kalau tingkat kegiatan ekonomi meningkat (*boom*). Singkatnya, pengangguran siklis adalah pengangguran di atas tingkat alamiah (*above the natural rate*) atau pengangguran yang terjadi ketika output berada di bawah tingkat kesempatan kerja penuh (*bellow full employment level*).¹¹

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah pengangguran, maka harus diketahui terlebih dahulu factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran tersebut. Kaufman dan Hotchkiss mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran adalah sebagai berikut : 1). Proses mencari kerja, 2). Kekakuan upah dan 3). Efesiensi upah.

Proses mencari kerja merupakan factor yang mempengaruhi pengangguran karena dengan munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Setiap perusahaan dalam menawarkan pekerjaan selalu memberikan kualifikasi tertentu yang harus dimiliki oleh pencari kerja, apabila pencari kerja tidak bisa memenuhi syarat maka akan tersingkir dari dunia kerja dan menjadi pengangguran.

Kekakuan upah dapat menjadi factor yang mempengaruhi pengangguran. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja.

¹¹ Muana Nanga, "*Makro Ekonomi*", Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 249

Akibatnya, akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja dan mengakibatkan pengangguran.

Efisiensi upah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengangguran. Semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja. Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.¹²

4. Pengangguran menurut Ekonomi Islam

Allah berfirman dalam QS. Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ الْأَرْضُ إِنَّ

*Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹³

¹² Khusnul Khotimah, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015", (Skripsi- Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018)

¹³ <https://tafsirweb.com/7127-quran-surat-al-qashash-ayat-77.html>

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk tidak bermalas-malasan dalam mencari rezeki. Barangsiapa yang berusaha dan berdoa Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya, menganggur bukan alasan untuk tidak bisa mendapatkan pekerjaan.¹⁴

2.1.3 Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah awal dan akhir dari suatu proses kemelaratan masyarakat. Bersama-sama faktor-faktor kelemahan jasmani, kerawanan, ketidakberdayaan dan isolasi, serta kemiskinan membuat masyarakat terjebak dan sulit keluar dari sindrom kemiskinan. Semua orang dimanapun berada pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata miskin dan kemiskinan, namun mereka enggan menelaah lebih jauh apa sebenarnya arti dari kemiskinan tersebut dan apa sebabnya seseorang dapat dikatakan miskin.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Sedangkan BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,

¹⁴ Etri Meisari, "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Guna Penanggulangan Pengangguran Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Pada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Pada Tahun 2011-2015)", (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2017)

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial.¹⁵

Menurut BPS (2018) mengartikan bahwa penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, dan lain-lain).

Menurut Todaro (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi 6 karakteristik berikut :

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju.
- f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.¹⁶

¹⁵ Sayifullah dan Tia Ratu Gnadasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten", Jurnal Ekonomi-Qu, Vol. 6, No. 2, 2018, Banten : Universitas Agung Tirtayasa, hlm. 242

2. Ukuran Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan absolut dan relatif.

a. Ukuran Kemiskinan Absolut

Merupakan pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori seseorang atau keluarga dalam satuan waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut.

Menurut BPS, ukuran kemiskinan dilihat dari sisi makanan dan non makanan dengan menggunakan konsep garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan dibangun di atas dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). GKM dihitung dengan pendekatan kalori, dimana standar kebutuhan kalori minimal seseorang adalah setara dengan angka 2.100 kkal per kapita per hari. Adapun GKNM dihitung berdasarkan konsumsi sejumlah komoditas bukan makanan (termasuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan), yaitu sebanyak 47 komoditas untuk daerah pedesaan dan 51 komoditas untuk daerah perkotaan.¹⁷ Sedangkan ukuran kemiskinan menurut World Bank (2015) adalah USD \$1,90 per orang per hari.¹⁸

b. Ukuran Kemiskinan Relatif

¹⁶ Safuridar dan Natasya Ika Putri, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur", Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No.1, 2019, Aceh : Universitas Samudra, hlm. 3

¹⁷ Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, "Ekonomi Pembangunan Syariah", Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.69

¹⁸ <https://document.worldbank.org/curated/en/6647515531005733765/National-Account-Data-Used-in-Global-Poverty-Measurement>, diakses 02 Januari 2020

Yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi relatif.

3. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, dimana standar hidup minimal berbeda antar negara.

b. Kemiskinan Relatif

Diartikan sebagai pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan demikian, kemiskinan relatif berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan. Pada pendekatan ini garis kemiskinan akan berubah seiring dengan perubahan tingkat hidup masyarakat.

c. Kemiskinan Struktural

Yaitu ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi.

4. Penyebab Kemiskinan

Terdapat tiga pendekatan yang mencoba untuk menjelaskan mengenai kemiskinan, yaitu:

a. *System Approach*

Pendekatan ini lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi.¹⁹ Kondisi demikian lebih banyak dialami oleh penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman. Dalam konteks demikian, pendekatan ini menyarankan adanya intervensi tertentu melalui pengenalan teknologi baru serta membangun dan memperbaiki sarana dan pra sarana transportasi dan komunikasi.

b. *Decision-making Model*

Pendekatan kedua menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian penduduk dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.²⁰ Dengan kata lain, sebagian penduduk kurang memiliki inovasi atau empati, dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) untuk mengelola unit-unit usaha yang mereka miliki atau kuasai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendekatan ini menghendaki adanya peningkatan kemampuan, yaitu keahlian dan keterampilan SDM.

c. *Structural Approach*

Pendekatan ketiga melihat bahwa penyebab kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilihan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi, dan bentuk kapital lainnya.²¹ Hal ini ditunjukkan dengan adanya sebagian penduduk di dalam masyarakat yang jumlahnya lebih kecil tetapi menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi secara dominan. Pendekatan ini menghendaki adanya penerapan kebijaksanaan politik pembangunan yang dapat menghapus ketimpangan.

5. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 234

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h.235

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu konsep multidimensional dan sulit didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu yang mendefinisikannya.

Kemiskinan dalam pandangan Islam sedikit berbeda dengan pandangan konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan dalam dua kategori yaitu fakir dan miskin. Menurut pendapat mazhab Syafii dan Hambali, orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.²² Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang fakir dan miskin, diantaranya adalah surat Al-Kahfi ayat 79 :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

*Artinya : “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”.*²³

Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Sedangkan Ibnu Jarir ath-Thabari mengemukakan perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang butuh sesuatu tetapi dapat menahan diri dari sifat meminta-minta, sedangkan miskin juga orang yang butuh sesuatu, tapi suka meminta-minta kepada orang lain karena jiwanya yang lemah.

Kriteria orang yang termasuk golongan orang miskin dalam Al-Qur'an :

²² Beik dan Arsyianti, *Ekonomi...*, h. 72

²³ <https://tafsirweb.com/4905-quran-surat-al-kahfi-ayat-79.html> diakses 30 Agustus 2020

1. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat.
2. Orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat buntut mencari nafkah.
3. Miskin walaupun lebih baik dari orang fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin sebagai berikut :

1. Prinsip ta'awun, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum.
2. Prinsip syura, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penganggulangan yang berkesinambungan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam menjelaskan bahwa orang miskin merupakan pihak yang berhak dibantu. Islam dengan menggunakan mekanisme pendistribusian yang adil dan mendorong agar pihak yang memiliki harta dapat membantu pihak yang kekurangan harta untuk meningkatkan kesejahteraannya.²⁴

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki ketertarikan permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

²⁴ Fauzi Aris Lubis, "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an", Jurnal Tansiq, UINSU, Vol. 1 No. 1, 2018, h.77

Tabel. 4
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1.	Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati (2018)	<i>“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”.</i>	1. Indeks Pembangunan Manusia (X1). 2. Pertumbuhan Ekonomi (X2). 3. Pengangguran (X3). 4. Kemiskinan (Y).	1. IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. 2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. 3. Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat

				kemiskinan.
2.	M. Alhudori (2017)	<i>“Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi”</i> .	1. Indeks Pembangunan Manusia (X1). 2. PDRB (X2). 3. Pengangguran (X3). 4. Penduduk Miskin (Y).	1. IPM berpengaruh positif terhadap penduduk miskin. 2. PDRB berpengaruh negatif terhadap penduduk miskin. 3. Pengangguran berpengaruh positif terhadap penduduk miski.
3.	Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari (2016)	<i>“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten”</i> .	1. Indeks Pembangunan Manusia (X1). 2. Pengangguran (X2). 3. Kemiskinan (Y).	1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan. 2. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap

				kemiskinan.
4.	Safuridar dan Natasya Ika Putri (2019)	<i>“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh Bagian Timur”</i> .	1. Indeks Pembangunan Manusia (X1). 2. Pengangguran (X2). 3. Jumlah Penduduk (X3). 4. Tingkat Kemiskinan (Y).	1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 3. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
5.	Yunnie Rahayu (2018).	<i>“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia,</i>	1. Indeks Pembangunan Manusia (X1). 2. PDRB Per	1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif

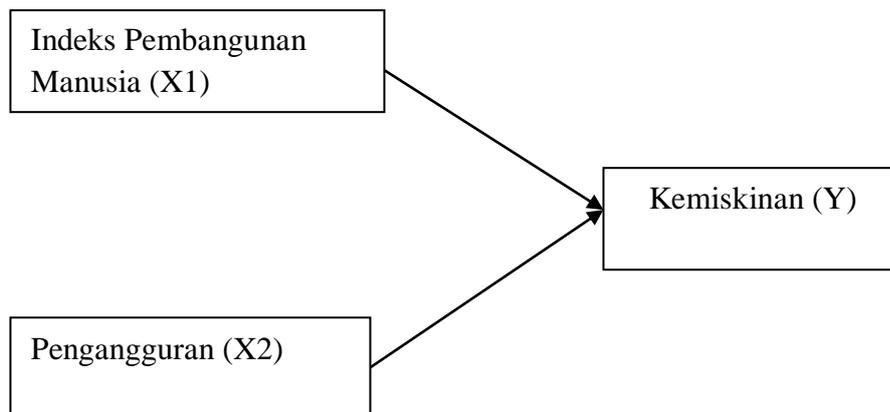
		<i>PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi”.</i>	Kapita (X2). 3. Pengangguran (X3). 4. Penduduk Miskin (Y).	terhadap jumlah penduduk miskin. 2. PDRB Per Kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. 3. Pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.
--	--	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran yang mempunyai hubungan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Sedangkan pengangguran mempunyai hubungan erat terhadap kemiskinan yaitu sebagai penentu masyarakat tersebut

sejahtera atau tidak. Kalau masyarakat mau bekerja, maka hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup begitupun juga sebaliknya. Kedua variabel tersebut digambarkan dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis yang diambil dari penelitian ini adalah :

H₀ : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota miskin di Jawa Tengah

H1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota miskin di Jawa Tengah

H0 : Pengangguran tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota miskin di Jawa Tengah

H2: Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota miskin di Jawa Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Adapun jenis data menurut dimensi waktu digolongkan menjadi data runtut waktu (*time-series*), data silang tempat (*cross-section*) dan data panel (*pooling*).²⁵

3.1.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian itu diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, data panel merupakan gabungan antara data *time series* (deret waktu) dan data *cross section* (deret hitung). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali dengan data yang digunakan dari tahun 2014-2018 tentang indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

²⁵ Mudrajad Kuncoro, " *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi* ", Edisi Kelima, Yogyakarta : upp STIM YKPN, 2018, h. 22-25

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten/kota yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota dari tahun 2013-2018. Populasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel .5

Populasi Penelitian

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Cilacap
2.	Kab. Banyumas
3.	Kab. Purbalingga
4.	Kab. Banjarnegara
5.	Kab. Kebumen
6.	Kab. Purworejo
7.	Kab. Wonosobo
8.	Kab. Magelang
9.	Kab. Boyolali
10.	Kab. Klaten
11.	Kab. Sukoharjo
12.	Kab. Wonogiri
13.	Kab. Karanganyar
14.	Kab. Sragen
15.	Kab. Grobogan
16.	Kab. Blora
17.	Kab. Rembang

²⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2018, h.80

18.	Kab. Pati
19.	Kab. Kudus
20.	Kab. Jepara
21.	Kab. Demak
22.	Kab. Semarang
23.	Kab. Temanggung
24.	Kab. Kendal
25.	Kab. Batang
26.	Kab. Pekalongan
27.	Kab. Pemasang
28.	Kab. Tegal
29.	Kab. Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.²⁷ Dalam penelitian ini sampel yang dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling berupa purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi yang

²⁷ *Ibid*, h.81

ada serta sesuai dengan tujuan dari penelitian. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berikut ini²⁸ :

1. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2014-2018
2. Memiliki data yang dibutuhkan terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode 2014-2018
3. Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, terdapat 7 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Tabel. 6
Sampel Penelitian

No.	Kabupaten
1.	Kab. Wonosobo
2.	Kab. Kebumen
3.	Kab. Rembang
4.	Kab. Brebes
5.	Kab. Purbalingga
6.	Kab. Pemalang
7.	Kab. Banjarnegara

²⁸ Warno, *Kepatuhan Koperasi di Kota Semarang terhadap Standar Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) Tahun 2013*, Jurnal Economica, Vol. V, Edisi 1, Semarang : UIN Walisongo, 2014, h. 152

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, dalil dan hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data dalam penelitian ini didapat dari data yang telah dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

3.2.2 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari beberapa sumber seperti buku, majalah, surat kabar, brosur, tabloid dan sebagainya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku teori serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.²⁹

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Penelitian ini memiliki dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y).

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) (X)

²⁹ Defi Sapitri, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018)

Variabel Independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain.³⁰ Variabel independen juga disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel Indeks Penguasaan Manusia (X1) dan Pengangguran (X2).

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel independen.³¹ Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan (Y).

3.5 Teknik Analisis Data

Model dalam penelitian ini adalah model hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Metode analisis data menggunakan *software IBM SPSS Statistics 21*.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik Deskriptif juga memberikan gambaran satu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, kurtosis dan skewness.³² Analisis deskriptif sangat membantu dalam meringkas perbandingan beberapa variabel

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Suluh Media, 2018, h. 53

³¹ *Ibid*, h.54

³² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005, h.19

data skala dalam satu tabel dan dapat digunakan untuk melakukan pengamatan outlier data. Selain itu bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan dari data yang diolah.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi kalsik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi linier disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu residual terdistribusi normal tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi dan hetroskedastisitas.³³

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak.³⁴ Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari nilai sampel sesuai dengan distribusi teoritis tertentu dalam hal adalah data berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov biasanya digunakan untuk menguji normalitas data secara berskala interval dan rasio. Dasar pengambilan keputusan diambil dari nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov. Data distribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

³³Duwi Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017, hlm. 107

³⁴ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Pulik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 223

independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada umumnya dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila bilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas.³⁵

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang satu dengan yang lain. Model regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas.³⁶ Heteroskedastisitas biasanya muncul pada data *cross section* dan jarang terjadi pada data *time series* (deret waktu).³⁷ Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Uji Glejser*. Jika nilai signifikansi residual lebih besar dari 0,05 maka dapat dipastikan tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi antar *error term* untuk periode yang berbeda atau korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*, artinya kondisi sekarang (periode t) dipengaruhi waktu

³⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi....h.105*

³⁶ Zumrotun Nafiah dan Warno, *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 10 No. 1, Semarang: STIE Semarang, 2018, h. 98

³⁷ Mahyus Ekananda, *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*, Edis Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 111

lalu $(t-1)$.³⁸ Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW Test). Ketentuan autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson antara lain :

- a. jika $d < d_1$, maka terjadi autokorelasi positif
- b. jika $d > d_1$, maka terjadi autokorelasi negatif
- c. jika $d_u < 4 - d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi
- d. jika $d_1 < d < 4 - d_1$, maka tidak dapat disimpulkan

3.5.3 Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinan (R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakan koefisien determinan (R^2). Koefisien determinan (R^2) merupakan angka yang menunjukkan bagaimana kemampuan dari variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Jika $R^2 = 1$ berarti 100 persen total variasi variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sedangkan, jika $R^2 = 0$ berarti tidak ada variasi variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Ini berarti jika R^2 besar, maka nilai e semakin kecil. Dengan demikian semakin besar nilai R^2 dari model yang dibuat, maka semakin baik dan sesuai dengan modelnya.³⁹

³⁸ Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 168

³⁹ Sri Mulyono, *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ed. 4, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, h. 112

2. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak atau bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Langkah-langkah uji F untuk mengetahui apakah koefisien regresi di dalam persamaan regresi berganda secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)
- b. Membuat rumusan hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

H_0 : Variabel IPM dan Pengangguran secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan

H_a : Variabel IPM dan Pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

- c. Mencari F hitung dan nilai F tabel dari tabel distribusi F
- d. Keputusan menerima atau menolak H_0 sebagai berikut :
Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 diterima. Ketika H_0 ditolak, berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel dependen. Sebaliknya jika H_0 diterima berarti variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.⁴⁰

⁴⁰ Agus Widarjono, "Analisis Statistika Multivariat Terapan Dilengkapi dengan SPSS Amos", Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010, h.24

3. Uji Signifikansi Parameter (Uji t)

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien dari variabel independen secara parsial. Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level 0,05 (α=5%)*.⁴¹

Langkah-langkah hipotesis dalam uji t sebagai berikut :

a. Rumusan Hipotesis, yaitu hipotesis nol (H₀) dan hipotesis alternatif (H_a).

b. Mencari nilai t hitung dan nilai t tabel dari tabel distribusi t

c. Membandingkan nilai statistik t hitung dan t kritisnya.

Keputusan untuk menolak atau menerima H₀ adalah sebagai berikut :

Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H₀ ditolak

Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka H₀ diterima

Ketika H₀ ditolak artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika H₀ diterima berarti variabel independen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4 Analisis Regresi

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat). Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel independen (bebas) yang digunakan. Penerapan metode regresi linier berganda, jumlah variabel

⁴¹ *Ibid*, h.28

independen (bebas) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel dependen (terikat).⁴²

Model regresi linier berganda dengan dua variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kemiskinan

X1 : IPM

X2 : Pengangguran

a : Konstanta

b₁ : Koefisien regresi IPM

b₂ : Koefisien regresi Pengangguran

e : error term

⁴² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h. 301

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah (Jawa adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa). Ibukotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.448 km², atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.⁴³

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Adapun misi dari Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.⁴⁴

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota. Administrasi pemerintahan Kabupaten dan Kota ini terdiri dari 545 Kecamatan dan 8.490 Desa/Kelurahan. Sebelum diberlakukannya

⁴³<https://indonesia.go.id/province/jawa-tengah>, diakses 01 Juli 2020

⁴⁴<https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/> diakses 01 Juli 2020

Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 Kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 2 Kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).⁴⁵

4.1.2 Profil Kabupaten

1. Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo berdiri pada tanggal 24 Juli 1825. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 7°11'20" sampai 7°36'24" garis Lintang Selatan (LS), serta 109°44'08" sampai 110°04'32" garis Bujur Timur (BT) , dengan luas wilayah 98.368 hektar (984,68 km²) atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut secara administrasi terbagi menjadi 15 kecamatan.

Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari ibukota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl – 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi parsial berada di tengah-tengah Pulau Jawa berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan.

⁴⁵<https://www.ptun-semarang.go.id/profil/sekilas-jawa-tengah.html>, diakses 01 Juli 2020

Gambar 4. 1

Peta Kabupaten Wonosobo



Batas wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.⁴⁶

2. Kabupaten Kebumen

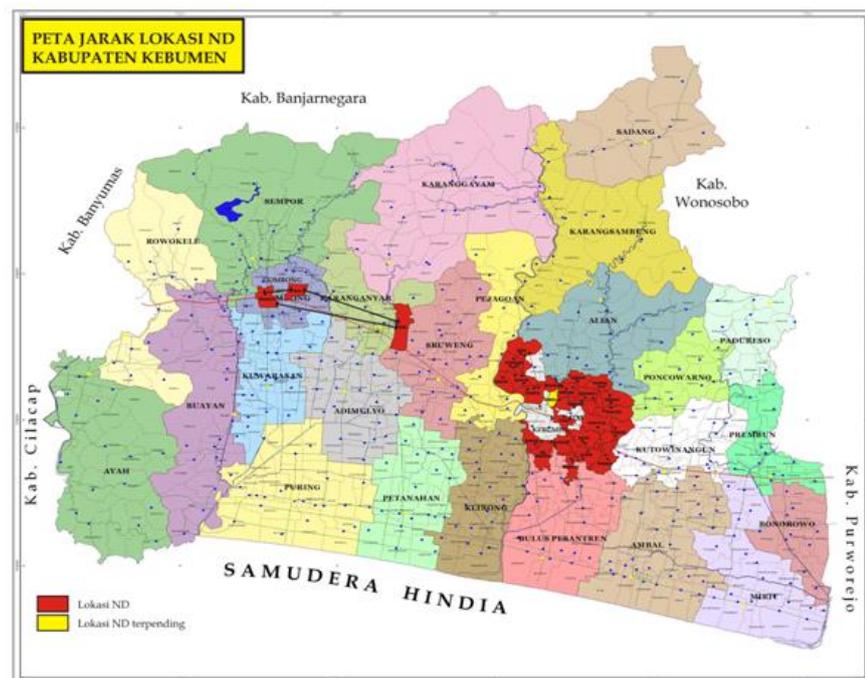
Kabupaten Kebumen lahir pada tanggal 26 Juni 1677. Kabupaten Kebumen terletak di $7^{\circ}27' - 7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}33' - 109^{\circ}50'$

⁴⁶<https://wonosobokab.go.id/website/index.php/> diakses 08 Agustus 2020

Bujur Timur. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat 39.748,00 hektar atau sekitar 31,03% merupakan lahan sawah dan 88.363,50 hektar atau 68,97% lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%), dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,56%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).⁴⁷

Gambar 4.2

Peta Kabuapten Kebumen



Batas wilayah Kabupaten Kebumen :

Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo & Kabupaten Wonosobo

⁴⁷<https://www.kebumenkab.go.id/index/php/public/page/index/24> diakses tanggal 08 Agustus 2020

Sebelah Barat : Kabuapten Banyumas & Kabuapaten Cilacap

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

3. Kabupaten Brebes

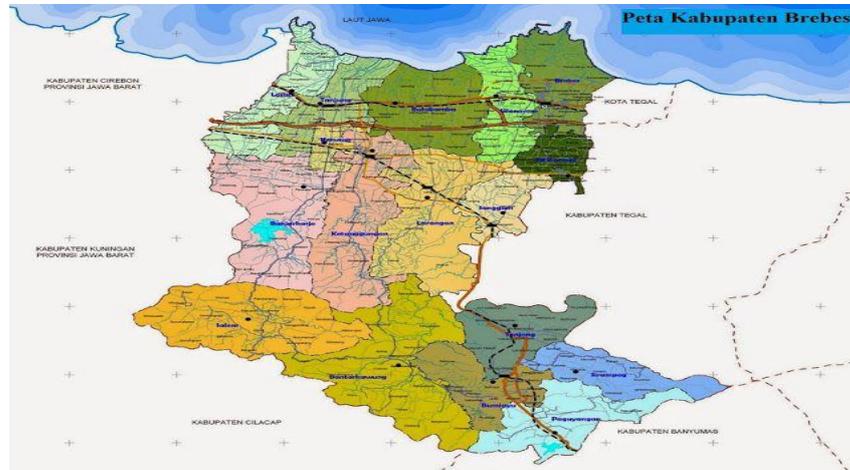
Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.902,37 km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.718 jiwa. Ibukotanya ada di Kecamatan Brebes.⁴⁸ Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Karisidenan Banyumas. Letaknya antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Kabupaten Brebes terbagi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan Bantarkawung adalah Kecamatan terluas dengan luas 205 km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Jatibarang sebesar 35,18 km². Wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan sebagian besar terletak di dataran tinggi. Sedangkan wilayah bagian utara terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampong dengan ketinggian 875 m.⁴⁹

⁴⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes#Batas_Wilayah diakses 08 Agustus 2020

⁴⁹https://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/6 diakses 08 Agustus 2020

Gambar 4.3

Peta Kabupaten Brebes



Batas Wilayah Kabupaten Brebes :

Bagian Utara : Laut Jawa

Bagian Timur : Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Bagian Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Bagian Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Jawa Barat).

4. Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Rembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Makam pahlawan pergerakan emansipasi wanita Indonesia, R.A. Kartini terdapat di Kabupaten Rembang yakni Desa Bulu yang masuk ke jalur Rembang-Blora (Mantingan). Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat $111^{\circ}00' - 111^{\circ}3'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30' - 7^{\circ}6'$ Lintang Selatan. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi

tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan laut.⁵⁰

Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah Kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah. Yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1.000 m.⁵¹

Gambar 4.4

Peta Kabupaten Rembang



5. Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya posisi $101^{\circ}11'$ – $109^{\circ}35'$ Bujur Timur dan

⁵⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang diakses 09 Agustus 2020

⁵¹http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/28 diakses 09 Agustus 2020

7°10' – 7°29' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu Ha). Dari 18 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.159 Ha. Urutan kedua Kecamatan Karangreja dengan luas 7.449 Ha, sedangkan urutan ketiga Kecamatan Karangmoncol yaitu 6.027 Ha. Tiga Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah dengan luas masing-masing 1.472 Ha, 1.727 Ha dan 2.251 Ha.⁵²

Kabupaten Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng. Bagian selatan merupakan Depresi Serayu yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali Gintung, dan anak sungai lainnya. Ibu Kota Kabupaten berada di Purbalingga sekitar 21 km sebelah timur laut Purwokerto.⁵³

⁵²http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/26 diakses 09 Agustus 2020

⁵³https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga#Geografi diakses 09 Agustus 2020

Gambar 4.5

Peta Kabupaten Purbalingga



Batas Wilayah Kabupaten Purbalingga :

Bagian Utara : Kabupaten Pemalang

Bagian Timur dan Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Bagian Barat dan Selatan : Kabupaten Banyumas

6. Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantau utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara $109^{\circ}17'30'' - 109^{\circ}40'30''$ BT dan $6^{\circ}52'30'' - 7^{\circ}20'11''$ LS.⁵⁴

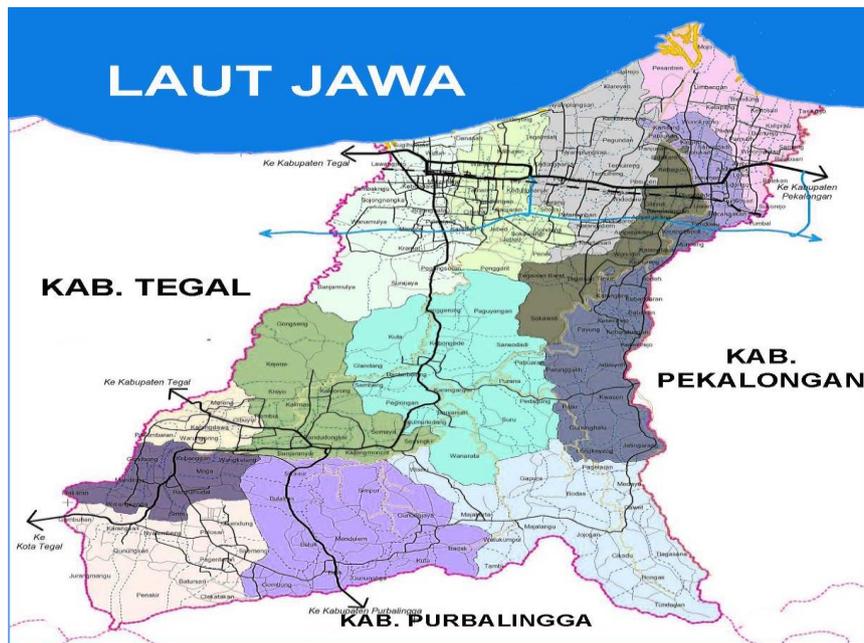
Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut dan bagian selatan merupakan dataran

⁵⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pemalang#Geografi diakses 26 Agustus 2020

tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur. Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal dan Ulujami.⁵⁵

Gambar 4.6

Peta Kabupaten Pemalang



Batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang :

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa

⁵⁵<https://www.pemalangkab.go.id> diakses 26 Agustus 2020

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

7. Kabupaten Banjarnegara

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara administratif, Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61 % total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara terletak antara $7^{\circ}12' - 7^{\circ}31'$ LS dan $109^{\circ}20'10'' - 109^{\circ}45'50''$ BT. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100-500 m dpl.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pefunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang ciuram, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.

Dampak kemiskinan sangatlah kompleks, orang miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga akan berpengaruh pada tingkat kesehatan dan tingkat produktivitas. Dengan produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang rendah, dengan demikian orang miskin akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah penduduk miskin merupakan tujuan hala yang sangat penting untuk menilai berbagai efektivitas jenis program pembangunan.⁵⁶

Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kekurangan ekonomi tetapi keterbatasan memperoleh pilihan-pilihan dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat memilih bergaul dengan kelompok yang memiliki derajat dan status sosial yang sama. Sehingga sebagian kecil masyarakat merasa terasingkan yang menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini lebih jelas terlihat di daerah perkotaan dimana si kaya semakin kaya dan si miskin semakin terasingkan di pinggir kota. Sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya 7 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Berikut ini akan disajikan data rata-rata kemiskinan tertinggi 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun yaitu 2014-2018 :

Tabel 4.1

Persentase Penduduk Miskin di 7 Kabuapten/Kota Termiskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam satuan persen)

No.	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1.	Wonosobo	22,8	21,42	21,45	20,32	17,58	20,57
2.	Kebumen	21,32	20,50	20,44	19,6	17,47	19,87

⁵⁶ Hendry Wijaya, dkk, “*Analisis Faktor-faktor yang Memepengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)*”, Jambi : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2020, h. 451

3.	Rembang	20,97	19,50	19,28	18,35	15,41	18,70
4.	Brebes	20,82	20,00	19,79	19,14	17,17	19,38
5.	Purbalingga	20,53	19,75	19,70	18,80	15,62	18,88
6.	Pemalang	19,27	18,44	18,30	17,37	16,04	17,88
7.	Banjarnegara	18,71	17,77	18,37	17,21	15,46	17,50

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018

4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan refleksi capaian pembangunan manusia secara luas, IPM sebagai indikator cara pandang sisi lain dari pembangunan, tidak hanya mengukur capaian materi (ekonomi) jangka pendek akan tetapi melihat capaian membangun kualitas hidup manusia yang diukur dengan tiga aspek kehidupan dasar, yaitu : pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup (ekonomi). IPM disusun secara hirarki tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga memungkinkan setuap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

IPM merupakan informasi tentang anggaran dan program kegiatan yang dilaksanakan secara efektif, dengan demikian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penyusun kebijakan pembangunan. Bagi pemerintah, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memonitor wilayah yang membutuhkan perhatian atau mendorong agar dapat mencapai target pembangunan yang ditetapkan, dengan kata lain IPM dapat digunakan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan jangka panjang dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Capaian IPM Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 69,98.

Capaian tersebut berada pada peringkat 13 dari 34 provinsi di Indonesia termasuk kelompok berstatus sedang. Selama periode 2010 sampai 2016 tersebut, IPM Jawa Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,98 persen per tahun.⁵⁷

Berikut ini akan disajikan data mengenai rata-rata persentase Indeks Pembangunan Manusia di 7 kabupaten/kota termiskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 :

Tabel 4.2

Persentase Indeks Pembangunan Manusia 7 Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam satuan persen)

No.	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1.	Wonosobo	65,2	65,7	66,19	66,89	67,81	66,35
2.	Kebumen	65,67	66,87	67,41	68,29	68,8	67,41
3.	Rembang	67,4	68,18	68,6	68,95	69,46	68,51
4.	Brebes	62,55	63,18	63,98	64,86	65,68	64,05
5.	Purbalingga	66,23	67,03	67,48	67,72	68,41	67,37
6.	Pemalang	62,35	63,7	64,17	65,04	65,67	64,36
7.	Banjarnegara	63,15	64,73	65,52	65,86	66,54	65,16

Sumber : *ipm.bps.go.id*

4.1.5 Pengangguran

Di Jawa Tengah sendiri khususnya, pengangguran merupakan salah satu kendala yang besar yang dihadapi. Akan tetapi, bila mana bisa menjadikan dari tiap-tiap daerah itu dari tahun ke tahun prosentasenya meningkat dengan baik, dalam artian produktivitas yang dihasilkan semakin bertambah maka hal tersebut akan bisa mengubah pengangguran di tingkat

⁵⁷ Mohammad Fauzan dkk, "Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah", Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 7 No. 1, 2020, Semarang : Universitas Stikubank, h. 51

provinsi menjadi lebih baik. Dalam hal ini menurut data dari BPS dijelaskan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Jawa Tengah tergolong rendah karena prosentasenya pada tahun 2019 sebesar 4,49 %. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dari persentase pengangguran pada tingkat nasional pada bulan Agustus 2019 yang mencapai 5,28 %.

Masalah pengangguran saat ini terjadi apabila jumlah dari penduduk tiap tahun naik, maka hal ini akan menjadikan ketidakseimbangan dalam dunia kerja karena jumlah penduduk yang ada itu tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, hal inilah yang akan berpengaruh terhadap GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor produksi di suatu negara dan pertumbuhan ekonomi dengan GDP yang meningkat diharapkan akan menyerap tenaga kerja ataupun sebaliknya bila mana GDP mengalami penurunan itu berarti terdapat banyak pengangguran.⁵⁸

Berikut ini akan disajikan data rata-rata tingkat pengangguran terbuka di 7 kabupaten/kota termiskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 :

Tabel 4.3

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 7 Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam satuan persen)

No.	Kabuapten	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1.	Wonosobo	5,82	5,34	4,47	4,18	3,44	4,65
2.	Kebumen	3,52	3,25	4,14	5,58	5,52	4,40
3.	Rembang	5,97	5,23	4,51	3,19	2,87	4,35
4.	Brebes	9,61	9,53	6,49	8,04	7,27	8,19
5.	Purbalingga	5,63	5,13	4,84	5,33	6,06	5,40
6.	Pemalang	6,48	7,44	6,53	5,59	6,21	6,45
7.	Banjarnegara	4,16	4,06	5,05	4,72	4,00	4,40

⁵⁸ Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk, "Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019", Salatiga : Jurnal Ekonomi IAIN Salatiga, Vol. 16, No. 1, 2020, h.2-3

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu pengujian statistik dimana pengujian ini bertujuan untuk melihat distribusi data variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut

Tabel 4.4

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KEMISKINAN (Y)	18.9906	1.82442	35
IPM (X1)	66.1506	1.91589	35
TPT (X2)	5.4057	1.61870	35

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Hasil dari analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa selama periode 2014-2018 rata-rata IPM adalah sebesar 66.1506 dengan standar deviasi sebesar 1.91589. Sedangkan untuk nilai rata-rata dari TPT adalah 5.4057 dengan standar deviasi sebesar 1.61870. Lalu untuk kemiskinan mempunyai nilai rata-rata sebesar 18.9906 dengan standar deviasi 1.82442.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modek regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal	Mean	.0000000
Parameter	Std. Deviation	1.77954677
s ^{a,b}		
Most	Absolute	.102
Extreme	Positive	.065
Difference	Negative	-.102
s		
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Hasil uji normalitas dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal ini berarti bahwa data yang nantinya akan diuji merupakan data yang berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen

(bebas). Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas pada umumnya dengan melihat nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	32.713	14.311		2.286	.029		
	IPM (X1)	-.208	.204	-.218	-1.019	.316	.648	1.544
	TPT (X2)	.004	.241	.004	.017	.986	.648	1.544

a. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Hasil dari uji multikolinieritas di atas diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari variabel IPM dan TPT adalah 0,648 dan nilai VIF sebesar 1,544. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Jika nilai signifikansi residual lebih besar dari 0,05 maka dipastikan tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.713	14.311		2.286	.029
IPM (X1)	-.208	.204	-.218	-1.019	.316
TPT (X2)	.004	.241	.004	.017	.986

a. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari tiap variabel yaitu variabel IPM sebesar 0,316 dan variabel TPT sebesar 0,986. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi, maka digunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria :

- a. Jika $d < d_l$, maka terjadi autokorelasi positif
- b. Jika $d > d_u$, maka terjadi autokorelasi negatif
- c. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi
- d. Jika $d_l < d < 4 - d_l$, maka tidak dapat disimpulkan

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.430 ^a	.185	.160	.08425126	2.160

a. Predictors: (Constant), Ut_1

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : Hasil Output IBM SPSS,2020

Tabel diatas menunjukkan nilai Durbin Watson (d) sebesar 2,160 dengan 2 variabel bebas dan jumlah pengamatan (N) sebesar 35, maka diperoleh nilai tabel dl = 1,3433 serta du =1,5838, 4-du = 2,4162. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai $du < d < 4-du$ ($1,5838 < 2,160 < 2,4162$). Nilai d berada diantara du dan 4-du, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase variasi perubahan variabel dependent (Y) yang disebabkan oleh variabel independent (X). Jika semakin besar, maka prosentase perubahan variabel independent (X) akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya.⁵⁹ Hasil dari uji nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

⁵⁹ Warno, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)", Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU, Vol. 10, No. 1, Jepara : UNISNU, 2013, h. 34

Tabel 4.9

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.220 ^a	.049	-.011	1.83431

a. Predictors: (Constant), TPT (X2), IPM (X1)

b. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

a. Predictors: (Constant), TPT, IPM

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Berdasarkan tabel output diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.049 atau 4,9%, jadi dapat disimpulkan bahwa 4,9% tingkat kemiskinan disebabkan oleh IPM dan TPT. Sedangkan sisanya yaitu 9,51% dipegaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak atau bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian hipotesis uji F.

Tabel 4.10**Hasil Uji F**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.052	1	.052	7.269	.011 ^b
	Residual	.227	32	.007		
	Total	.279	33			

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

b. Predictors: (Constant), Ut_1

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Rumus F tabel = $F(k;n-k) = F(2;35-2) = F(2;33) = 3,28$. Berdasarkan Uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung $7,269 > F$ tabel $3,28$ dan nilai probabilitas $0,011$ lebih kecil dari $0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, berarti variabel IPM (X1) dan TPT (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y).

3. Uji Signifikansi Parameter (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mrengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu IPM (X1) dan TPT (X2) terhadap kemiskinan (Y). Uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11**Hasil Uji t**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.008	.014		-.530	.600
	Ut_1	.436	.162	.430	2.696	.011

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

1. H1 : IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kab/kota termiskin di Jawa Tengah

Pada tabel 4.11, diketahui bahwa dari hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,530, jika dibandingkan dengan nilai t tabel 2,037, maka nilai t hitung $-0,530 < t \text{ tabel } 2,037$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,60 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah (H1) diterima.

2. H2 : Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah.

Pada tabel 4.11 diketahui bahwa dari hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,696 jika dibandingkan dengan nilai t tabel 2,037 maka t hitung $2,696 > t \text{ tabel } 2,037$ dengan nilai signifikansi $0,01 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah (H2) ditolak.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut hasil uji regresi dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 4.12

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	32.713	14.311		2.286	.029		
IPM (X1)	-.208	.204	-.218	1.019	.316	.648	1.544
PENGANGGURAN (X2)	.004	.241	.004	.017	.986	.648	1.544

a. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

Hasil Output IBM SPSS, 2021

Hasil uji regresi linier di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = 32,713 - 0,208 X1 + 0,004 X2 + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda yaitu :

1. Konstanta sebesar 32,713 artinya jika IPM (X1) dan Pengangguran (X2) nilainya 0, maka tingkat kemiskinan (Y) nilainya positif yaitu sebesar 32,713 persen.
2. Koefisien regresi variabel IPM (X1) sebesar -0,208 berarti bahwa variabel IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya jika IPM naik satu miliar rupiah maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,208 persen dan sebaliknya.
3. Koefisien regresi variabel pengangguran (X2) sebesar 0,004 berarti variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (Y), artinya jika pengangguran naik satu persen maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,004 persen dan sebaliknya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel IPM dari hasil pengujian t menunjukkan nilai t hitung IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kab/kota termiskin di Jawa Tengah. Pada tabel 4.11, diketahui bahwa dari hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,530 jika dibandingkan dengan nilai t tabel 2,037, maka nilai t hitung $-0,530 < t \text{ tabel } 2,037$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,60 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian M.Alhudori (2017) bahwa IPM mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dimana jika IPM naik 1 persen maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,53% begitupun sebaliknya. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kehidupan hidup yang lebih layak.

4.3.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel tingkat pengangguran dari hasil pengujian uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,696 jika dibandingkan dengan nilai t tabel 2,037 maka $t \text{ hitung } > t \text{ tabel } 2,037$ dengan nilai signifikansi $0,01 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin Prasetyoningrum dan U.Sulia Sukmawati (2018) bahwa pengangguran sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran merupakan salah satu indikator yang sangat terkait dengan pendapatan. Masyarakat

yang menganggur pasti tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran dalam memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi maka mereka termasuk dalam kategori miskin.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat IPM dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil perhitungan uji t dengan nilai t hitung sebesar -0,530 lebih kecil daripada t tabel dengan besaran 2,037. Besar pengaruh adalah -0,208 dengan nilai signifikansi 0,60.
2. Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil perhitungan uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,696 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel 2,037 dengan besaran pengaruh 0,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,01.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan simpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
 - a. Jumlah pengangguran berpengaruh kepada peningkatan kemiskinan di 7 Kab/Kota termiskin di Jawa Tengah sehingga perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi para tenaga kerja agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah selayaknya memberikan pelatihan-pelatihan kepada penduduk yang usia produktif untuk bisa mandiri meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha agar memiliki penghasilan tambahan, menyerap lapangan pekerjaan, dan akan membuat pengangguran semakin sedikit dan jumlah penduduk miskin akan berkurang.

b. Pemerintah harus lebih meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, meningkatkan teknologi, dan mencapai daya beli masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang masih rendah. Meningkatkan pencapaian tingkat pendidikan formal masih perlu di upayakan oleh pemerintah dan upaya peningkatan dan perbaikan infrastruktur dan kesehatan dan stabilitas harga dimana aspek-aspek tersebut merupakan komponen penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di kab/kota termiskin di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Masyarakat

a. Masyarakat harus ikut berperan dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan dimulai dari diri sendiri dan masyarakat harus ikut berperan dalam partisipasi berupa kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan agar masyarakat lebih mandiri dengan mengasah keterampilan atau keahlian untuk membuka peluang usaha sendiri agar meningkatkan pendapatan.

b. Masyarakat hendaknya juga harus aktif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan baru dengan membuat usaha mikro kecil untuk membantu menaikkan kesejahteraan dan tentunya sedikit demi sedikit mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nanga,Muana, “*Makro Ekonomi*”, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Syauqi Beik,Irfan. Dwi Arsyianti,Laily, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”,
Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* ”, Bandung
: Alfabeta, 2018
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*,
Edisi Pertama, Cet Ke-1, Yogyakarta: Suluh Media, 2018
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*,
Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005
- Kuncoro, Mudrajad” *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis
dan Ekonomi*”, Edisi Kelima, Yogyakarta : upp STIM YKPN, 2018
- Priyatno, Duwi, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*,
Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017
- Burhan Bungin,M, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi,
dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta:
Kencana, 2014
- Ekananda, Mahyus, *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial
dan Bisnis*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media , 2015
- Tri Wahyudi,Setyo, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan
E-Views*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Mulyono,Sri, *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ed. 4, Jakarta:Mitra
Wacana Media, 2017

Widarjono, Agus, “*Analisis Statistka Multivariat Terapan Dilengkapi dengan SPSS Amos*”, Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Rianto Al Arif, M. Nur , *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010

....., *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010

....., “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Prasetyo Ningrum, Ari Kristin. Sukmawati ,U. Sulia, “*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 1, Kudus : STAIN Kudus, 2018

Setiawan, Firman dan Hasanah, Iswatul “ *Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, Vol. 1. Madura : Universitas Trunojoyo, 2016

Alhudori, M, “*Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*”, *Jurnal of Economics and Business*, Vol.1 No.1, Jambi: Universitas Batanghari, 2017

....., *Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*”, *Jurnal of Economics and Business*, Vol.1 No.1, Jambi: Universitas Batanghari, 2017

....., “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* ”, Bandung : Alfabeta, 2018

....., *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005

....., *“Analisis Statistka Multivariat Terapan Dilengkapi dengan SPSS Amos”*, Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010

Rahayu, Yunie, *“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi”*, Jurnal of Economics and Business, Vol.2, No.1, Jambi : STIE Muhammadiyah, 2018

Kurniawan, Rizky Agung *“Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2007-2016”*, JUPE, Vol.6, Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2018

Mahroji, Dwi dan Nurkhasanah, Iin. *“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten”*, Jurnal Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2013

Dwi Heriansyah, Rio et. al, *“Analisis Pengaruh Jumlah Industri dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012-2016”*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2, Jilid 3, 2018

Bukhari, As’ad, *“Islam dan Pembangunan Manusia Di Era Globalisasi”*, Jurnal Studi Islam, Vol.5, No. 1, 2018

....., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Suluh Media, 2018

Khotimah, Khusnul, *“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015”*, (Skripsi- Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018)

Meisari, Etri, *“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Guna Penanggulangan Pengangguran Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Pada UPTD Balai Latihan Kerja*

Bandar Lampung Pada Tahun 2011-2015)”, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Sayifullah dan Ratu Gandasari, Tia, “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten*”, Jurnal Ekonomi-Qu, Vol. 6, No. 2, Banten : Universitas Agung Tirtayasa, 2018

Safuridar dan Ika Putri, Natasya “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur*”, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No.1, Aceh : Universitas Samudra, 2019

Warno, *Kepatuhan Koperasi di Kota Semarang terhadap Standar Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) Tahun 2013*, Jurnal Economica, Vol. V, Edisi 1, Semarang : UIN Walisongo, 2014

Sapitri, Depi, “*Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018)

Nafiah, Zumrotun dan Warno, *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 10 No. 1, Semarang: STIE Semarang, 2018

Wijaya, Hendry dkk, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)*”, Jambi : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2020

Fauzan, Mohammad dkk, “*Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah*”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 7 No. 1, Semarang : Universitas Stikubank, 2020

Albab Al Umar, Ahmad Ulil dkk, “*Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tigkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019*”, Salatiga : Jurnal Ekonomi IAIN Salatiga, Vol. 16, No. 1, 2020

Warno, “*Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU, Vol. 10, No. 1, Jepara : UNISNU, 2013

<https://www.google.com>

<https://tafsirweb.com/7127-quran-surat-al-qashash-ayat-77.html>

<https://document.worldbank.org/curated/en/6647515531005733765/National-Account-Data-Used-in-Global-Poverty-Measurement>,

<https://tafsirweb.com/4905-quran-surat-al-kahfi-ayat-79.html>

<https://indonesia.go.id/province/jawa-tengah>

<https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/>

<https://www.ptun-semarang.go.id/profil/sekilas-jawa-tengah.html>

<https://wonosobokab.go.id/website/index.php/>

<https://www.kebumenkab.go.id/index/php/public/page/index/24>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes#Batas_Wilayah

https://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/6

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang

http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/28

http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/26

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga#Geografi

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pemalang#Geografi

<https://www.pemalangkab.go.id>

LAMPIRAN**Lampiran 1****Data Sampel Penelitian**

No.	Kabupaten
1.	Kab. Wonosobo
2.	Kab. Kebumen
3.	Kab. Rembang
4.	Kab. Brebes
5.	Kab. Purbalingga
6.	Kab. Pemalang
7.	Kab. Banjarnegara

Lampiran 2

Data Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian

No	Kabupaten	Tahun	IPM	Pengangguran(X2)	Kemiskinan(Y)
			(X1)	(%)	(%)
1.	Kab. Wonosobo	2014	65,2	5,82	22,8
		2015	65,7	5,34	21,42
		2016	66,1 9	4,47	21,45
		2017	66,8 9	4,18	20,32
		2018	67,8 1	3,44	17,58
2.	Kab. Kebumen	2014	65,6 7	3,52	21,32
		2015	66,8 7	3,25	20,50
		2016	67,4 1	4,14	20,44
		2017	68,2 9	5,58	19,6
		2018	68,8	5,52	17,47
3.	Kab. Rembang	2014	67,4	5,97	29,7
		2015	68,1 8	5,25	19,50
		2016	68,6	4,51	19,28
		2017	68,9 5	3,19	18,35
		2018	69,4 6	2,87	15,41
4.	Kab.	2014	62,5	9,61	20,82

	Brebes		5		
		2015	63,1 8	9,53	20,00
		2016	63,9 8	6,49	19,79
		2017	64,8 6	8,04	19,14
		2018	65,6 8	7,27	17,17
5.	Kab. Purbalingg a	2014	66,2 3	5,63	20,53
		2015	67,0 3	5,13	19,75
		2016	67,4 8	4,83	19,70
		2017	67,7 2	5,33	18,80
		2018	68,4 1	6,06	15,62

6.	Kab. Pematang	2014	62,35	6,48	19,27
		2015	63,7	7,44	18,44
		2016	64,17	6,53	18,30
		2017	65,04	5,59	17,37
		2018	65,67	6,21	16,04
7.	Kab. Banjarnegara	2014	63,15	4,16	18,71
		2015	64,73	4,06	17,77
		2016	65,52	5,05	18,37
		2017	65,86	4,72	17,21
		2018	66,54	4,00	15,46

Lampiran 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KEMISKINAN (Y)	18.9906	1.82442	35
IPM (X1)	66.1506	1.91589	35
TPT (X2)	5.4057	1.61870	35

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	35
Normal Mean	.0000000
Parameter Std. Deviation	1.77954677
$s^{a,b}$	
Most Absolute	.102
Extreme Positive	.065
Difference Negative	-.102
s	
Test Statistic	.102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	32.713	14.311		2.286	.029		
IPM (X1)	-.208	.204	-.218	-1.019	.316	.648	1.544
TPT (X2)	.004	.241	.004	.017	.986	.648	1.544

a. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.713	14.311		2.286	.029
IPM (X1)	-.208	.204	-.218	-1.019	.316
TPT (X2)	.004	.241	.004	.017	.986

a. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2020

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.430 ^a	.185	.160	.08425126	2.160

a. Predictors: (Constant), Ut_1

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.220 ^a	.049	-.011	1.83431

a. Predictors: (Constant), TPT (X2), IPM (X1)

b. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.052	1	.052	7.269	.011 ^b
Residual	.227	32	.007		
Total	.279	33			

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

b. Predictors: (Constant), Ut_1

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.008	.014		-.530	.600
Ut_1	.436	.162	.430	2.696	.011

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	32.713	14.311		2.286	.029		
IPM (X1)	-.208	.204	-.218	1.019	.316	.648	1.544
PENGANGGURAN (X2)	.004	.241	.004	.017	.986	.648	1.544

a. Dependent Variable: KEMISKINAN (Y)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Wahyuni
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 28 Juli 1997
Alamat : Desa Ngurenrejo RT:06 RW:03, Kec.
Wedarijaksa Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah
No. HP : 089503349119
Email : sriwahyuni28797@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Ngurenrejo Lulus Tahun 2009
2. MTs. Bustanul Ulum Pagerharjo Lulus Tahun 2012
3. MA Bustanul Ulum Pagerharjo Lulus Tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Angkatan 2015

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis,

Sri Wahyuni

NIM 1505026169

